

**PENGARUH KOMITE AUDIT, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN UKURAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA TINGKAT KEPATUHAN
PENGUNGKAPAN TRANSAKSI BERELASI BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 7**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:
Rocky Putra Wibowo
14812141061

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2018**

PERSETUJUAN

**PENGARUH KOMITE AUDIT, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN UKURAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA TINGKAT KEPATUHAN
PENGUNGKAPAN TRANSAKSI BERELASI BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 7**

SKRIPSI



Oleh:
ROCKY PUTRA WIBOWO
14812141061

Telah disetujui dan disahkan
Pada tanggal 17 Juli 2018

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi
Jurusan Pendidikan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui
Dosen Pembimbing



Dr. Ratna Candra Sari, SE., M.Si, Ak.
NIP. 197610082008012014

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

PENGARUH KOMITE AUDIT, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN TRANSAKSI BERELASI BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 7

Oleh:
ROCKY PUTRA WIBOWO
14812141061

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 31 Juli 2018 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Abdullah Taman, SE.Ak.,M.Si., C.A.	Ketua Penguji		6/8 2018
Dr. Ratna Candra Sari, SE., M.Si, Ak.	Sekretaris Penguji		6/8 2018
Mimin Nur Aisyah, M.Sc., Ak.	Penguji Utama		6/8 2018

Yogyakarta, 8 Agustus 2018
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan



Dr. Sugiharsono, M.Si.
NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rocky Putra Wibowo
NIM : 14812141061
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : PENGARUH KOMITE AUDIT, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN TRANSAKSI BERELASI BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 7

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim:

Yogyakarta, 17 Juli 2018

Penulis,



Rocky Putra Wibowo

NIM. 14812141061

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka”

(Q.S. Ar-Ra’d: 11)

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri”

(Q.S. Al-Isra’: 7)

“Untuk jadi maju memang banyak hambatan. Kecewa semenit dua menit boleh, tapi setelah itu harus bangkit lagi”

Joko Widodo

“Jangan pernah berhenti bermimpi, karena mungkin suatu saat nanti mimpi kalian akan jadi kenyataan”

Bambang Pamungkas

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahum, Tugas Akhir Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua serta adik yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
2. Almamaterku, Universitas Negeri Yogyakarta.

**PENGARUH KOMITE AUDIT, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN UKURAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA TINGKAT KEPATUHAN
PENGUNGKAPAN TRANSAKSI BERELASI BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 7**

Oleh:
ROCKY PUTRA WIBOWO
14812141061

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pengaruh komite audit terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi, (2) pengaruh komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi, (3) pengaruh ukuran kantor akuntan publik (KAP) terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi, (4) pengaruh komite audit, komisaris independen, dan ukuran KAP terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 52 perusahaan yang bergerak dalam sektor utama. Data yang digunakan berupa laporan keuangan yang didapatkan dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda.

Hasil dari penelitian ini adalah : (1) komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi, (2) komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi, (3) ukuran KAP berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi, (4) komite audit, komisaris independen, dan ukuran KAP secara bersama berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi.

Kata kunci: Komite Audit, Komisaris Independen, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi

***THE EFFECT OF AUDIT COMMITTEE, INDEPENDENT COMMISSIONERS,
AND PUBLIC ACCOUNTANT FIRM SIZE ON THE LEVEL OF RELATED
PARTY TRANSACTIONS DISCLOSURE BASED ON STATEMENT OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD 7***

By:
ROCKY PUTRA WIBOWO
14812141061

ABSTRACT

This research aims to analyze the influences of (1) audit committee on the level of related party transactions disclosure, (2) independent commissioners on the level of related party transactions disclosure, (3) public accountant firm size on the level of related party transactions disclosure, (4) audit committee, independent commissioners, and public accountant firm size on the level of related party transactions disclosure.

This research was a comparative causal research that used a quantitative method. The population in this research were companies that listed on the Indonesia Stock Exchange. The number of samples in this research were 52 companies engaged in the main sector. The data used in the form of financial statements obtained from Indonesia Stock Exchange's official website. Classic assumption test included normality test, multicollinearity test, and heteroskedasticity test. Hypothesis test used was simple regression analysis and multiple regression analysis.

The results of this study are: (1) audit committee positively affect the level of related party transactions disclosure, (2) independent commissioners have no significant effect on the level of related party transactions disclosure, (3) public accounting firm size positively affect the level of related party transactions disclosure, (4) audit committee, independent commissioners, and public accounting firm size positively affect the level of related party transactions disclosure.

Keyword: *audit committee, independent commissioner, public accounting firm size, related party transaction disclosure level.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Pada Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 7” dengan lancar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayah, Ibu, Adik, dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, nasihat, motivasi, doa, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. RR. Indah Mustikawati, M.Si., Ak., CA., Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Dr. Denies Priantinah, M.Si., Ak., CA., Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

6. Dr. Ratna Candra Sari, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir Skripsi yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, kritik, dan saran, serta arahan yang membangun selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
7. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
8. Teman-teman Akuntansi B 2014 yang telah banyak membantu selama proses studi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan bantuan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan Tugas Akhir Skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat semua pihak.

Yogyakarta, 17 Juli 2018

Penulis,



Rocky Putra Wibowo

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
TABEL LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II KUJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori	12
B. Hasil Penelitian yang Relevan	24
C. Kerangka Berpikir	28
D. Paradigma Penelitian.....	32
E. Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis atau Desain Penelitian	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian	34

C. Populasi dan Sampel Penelitian	35
D. Definisi Operasional.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Pengujian Hipotesis.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Deskripsi Data Penelitian.....	44
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	46
C. Hasil Uji	50
D. Pembahasan Hasil Penelitian	61
E. Keterbatasan Penelitian	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rincian Perusahaan Sektor Utama	45
2. Hasil Seleksi Sampel.....	45
3. Statistik Deskriptif	46
4. Kecenderungan data tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi	48
5. Persebaran Komite Audit	48
6. Persebaran Komisaris Independen	49
7. Persebaran Ukuran KAP	50
8. Hasil Uji Statistik Normalitas	51
9. Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	52
10. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	53
11. Hasil Regresi Linear Sederhana (X1)	53
12. Hasil Regresi Linear Sederhana (X2)	55
13. Hasil Regresi Linear Sederhana (X3)	57
14. Hasil Regresi Linear Berganda	59

TABEL LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. PSAK 7 mengenai pengungkapan.....	77
2. Data Sampel	80
3. Hasil Uji Normalitas	82
4. Hasil Uji Multikolinearitas.....	82
5. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	83
6. Hasil Uji Hipotesis 1	83
7. Hasil Uji Hipotesis 2	84
8. Hasil Uji Hipotesis 3	85
9. Hasil Uji Hipotesis 4.....	86

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, terdapat dua struktur kepemilikan grup, yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi. Implikasi dari perbedaan struktur kepemilikan adalah pada pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham pengendali dapat memilih dan melantik manajer yang bekerja untuk kepentingan pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki wewenang dalam pemilihan manajer. Pada perusahaan yang dikontrol oleh keluarga atau grup tertentu, direktur noneksekutif umumnya adalah anggota keluarga atau grup. Struktur kepemilikan keluarga dan grup pada perusahaan-perusahaan yang telah *go public* di Indonesia menyebabkan banyak terjadinya transaksi berelasi (Sari dan Sugiharto, 2014). Transaksi berelasi sebenarnya bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan dan *stakeholder* melalui peningkatan efisiensi dalam mencapai kesejahteraan grup. Akan tetapi, transaksi berelasi sendiri dalam beberapa kasus sering disalahgunakan untuk tujuan oportunistik atau mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham non-pengendali bahkan dapat merugikan perusahaan, masyarakat, hingga negara. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan

adanya *conflict of interest* antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non-pengendali.

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi akan ada ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Jensen dan Meckling (1976) juga memandang hubungan antara manajer dan pemegang saham pengendali sebagai pemilik termasuk dalam hubungan keagenan. Dalam hubungan keagenan, terjadi kontrak antara kedua belah pihak. Kontrak antara kedua pihak tersebut mengharuskan bagi pihak agen untuk dapat memberikan jasa kepada pemilik. Pendelegasian wewenang dari pemilik kepada manajemen membuatnya memiliki hak untuk mengambil keputusan bisnis bagi perusahaan untuk kepentingan pemilik. Dalam pendelegasian wewenang tersebut dikarenakan adanya *conflict of interest*, manajemen dapat menyalah gunakan wewenang yang didapatkan dengan membuat keputusan bukan untuk tujuan ekonomis perusahaan, melainkan digunakan untuk tujuan oportunistis, termasuk pengambilan keputusan terkait transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Penggunaan transaksi berelasi secara oportunistis dapat digunakan untuk tujuan meningkatkan laba perusahaan, melakukan penjualan dengan harga yang tidak wajar (*transfer pricing*), atau melakukan pertukaran aset dengan kualitas barang yang berbeda.

Transaksi berelasi bukanlah suatu hal yang dilarang. Namun, dikarenakan terdapat dua kemungkinan dalam tujuan penggunaan transaksi berelasi yaitu untuk tujuan ekonomis atau tujuan oportunistis, sangat diperlukan pengungkapan terkait transaksi berelasi pada setiap laporan keuangan perusahaan. Dalam menyikapi hal tersebut, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan salah satu ayat di PSAK yang mengatur mengenai transaksi berelasi yaitu PSAK nomor 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. PSAK 7 dibuat untuk mengatur transaksi pihak berelasi guna mengontrol adanya transaksi pihak berelasi. IAI sendiri mengharapkan dengan disahkannya peraturan PSAK 7, transaksi antara pihak-pihak yang saling berelasi diungkapkan kedalam laporan keuangan sehingga dapat meminimalkan terjadinya penyalahgunaan transaksi berelasi yang dapat mengakibatkan kerugian pada berbagai pihak. Selain PSAK 7, Badan Pengawas Pasar Modal atau lebih dikenal dengan BAPEPAM juga telah membuat peraturan yang mengatur pengungkapan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan.

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi paling penting bagi para investor serta *stakeholder* untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. Dalam pengungkapan laporan keuangan diperlukan pengungkapan secara menyeluruh sesuai data yang ada bahkan untuk informasi yang bersifat negatif serta sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PSAK, yaitu relevan, keandalan, dapat

dibandingkan, dan dapat dipahami. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya informasi yang salah atau informasi yang disembunyikan yang dapat merugikan pihak lain seperti investor, *stakeholder*, ataupun pihak lain yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Sama halnya dengan transaksi berelasi, pengungkapan secara menyeluruh sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah transaksi berelasi digunakan untuk kepentingan bersama atau untuk tujuan oportunistik. Berdasarkan PSAK No. 7, hal-hal yang wajib untuk diungkapkan terkait dengan transaksi berelasi antara lain hubungan dengan pihak berelasi, jenis transaksi, nilai transaksi, dan sebagainya. Namun, meskipun pengungkapan transaksi berelasi telah diatur dalam PSAK, tingkat pengungkapan wajib perusahaan *go public* di Indonesia atas pos-pos laporan keuangan masih rendah, yaitu sebesar 56,48% (Sari dan Sugiharto, 2014). Dikarenakan masih lemahnya tingkat kepatuhan pengungkapan di Indonesia, tidak sedikit pula perusahaan yang memanfaatkan celah tersebut agar dapat menggunakan transaksi berelasi untuk tujuan oportunistik.

Contoh kasus penyalahgunaan transaksi berelasi yang ada di Indonesia yaitu kasus *transfer pricing* antara PT Adaro Indonesia dengan perusahaan afiliasinya, Coltrade Service International, Pte. PT Padang Karunia merupakan pemegang saham pengendali di kedua perusahaan tersebut, tepatnya memiliki 61% saham PT Adaro Indonesia dan 59% saham Coltrade Service International, Pte. Transfer pricing yang dilakukan oleh PT Padang Karunia yaitu dengan

menjual batubara milik PT Adaro Indonesia kepada perusahaan afiliasinya di Singapura yaitu Coltrade Service International yang merupakan perusahaan trading di Singapura dengan harga yang dapat dikatakan jauh di bawah harga pasar pada saat itu. Adaro menjual batu bara tersebut ke Coaltrade dengan harga \$32 per ton, sedangkan harga pasar batu bara pada saat itu adalah \$95 per ton. Coltrade yang mendapat batu bara dengan harga jauh di bawah standar pasar kemudian menjual kembali batu bara tersebut dengan harga standar pasar. Dari penjualan batu bara Adaro kepada Coltrade tersebut menyebabkan penurunan laba PT Adaro Indonesia, pada tahun 2005 laba Adaro yang seharusnya terhitung dapat menghasilkan laba sebesar \$1,287 miliar (Gatra, 2007) jika menjual seluruh batu baranya dengan harga pasar, tercatat hanya dapat menghasilkan laba sebesar \$697,1 juta. Dalam tahun yang sama, Coltrade yang hanya dikelola oleh lima orang dapat menghasilkan laba bersih sebesar \$42,4 juta. Transaksi transfer pricing tersebut jelas mengakibatkan kerugian pada para pemegang saham minoritas di PT Adaro Indonesia (39%), sedangkan PT Padang Karunia yang menjadi pemegang saham mayoritas di kedua perusahaan tersebut tetap mengalami keuntungan karena kerugian pada Adaro tertutup oleh keuntungan di Coaltrade. Selain kerugian pada pemegang saham minoritas, negara juga terkena dampaknya. *Tunneling* yang dilakukan PT Padang Karunia tersebut dengan memindahkan aset dari Indonesia ke Singapura yang merupakan negara tax heaven menyebabkan berkurangnya pendapatan pajak negara.

Transaksi berelasi untuk kedepannya diharapkan dapat diawasi dan dikontrol dengan lebih baik dengan adanya peraturan PSAK 7 yang telah dikeluarkan oleh IAI sehingga kasus *tunneling* seperti yang dilakukan oleh PT Padang Karunia yang telah banyak merugikan berbagai pihak dapat dihindari. Transaksi berelasi yang diarahkan ke tujuan oportunistik juga diharapkan dapat diminimalkan dari dalam perusahaan melalui komite audit serta komisaris independen yang merupakan bagian penting dalam penerapan *good corporate governance* di perusahaan melalui pengawasan lebih dan membatasi perilaku oportunistik manajemen, serta memastikan pengungkapan transaksi berelasi yang lebih transparan. Komite audit sendiri bertugas sebagai pengawas terhadap manajemen dalam pelaksanaan strategi pengelolaan, pengelolaan perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Juvita (2013) komite audit secara tidak langsung dapat menekan manajemen laba yang merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan transaksi berelasi.

Komisaris independen sama halnya dengan komite audit yang memiliki peran penting dalam penerapan *good corporate governance* pada perusahaan. Komisaris independen memiliki tugas sentral dalam membantu dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan perusahaan, termasuk pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi. Komisaris independen bertanggung jawab untuk memastikan transaksi berelasi perusahaan adalah untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan

bukan untuk tujuan oportunistis. BAPEPAM sendiri dalam upayanya untuk mendukung penerapan *good corporate governance* telah menerapkan peraturan mengenai minimal personil untuk komite audit serta komisaris independen yang wajib dimiliki dalam perusahaan, namun sangat disayangkan karena hingga saat ini masih ada beberapa perusahaan di Indonesia yang memiliki jumlah komite audit maupun komisaris independen dibawah dari jumlah wajib minimal yang telah diatur.

Selain komite audit dan komisaris independen, auditor diharapkan diharapkan dapat pula membantu memengaruhi pengungkapan transaksi pihak berelasi sehingga informasi terkait transaksi berelasi yang disembunyikan dapat lebih diminimalkan. Auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar tentu diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik. KAP berukuran besar seperti *big-four* yang memiliki kantor akuntan banyak yang tersebar di berbagai negara tentu memiliki pengalaman yang lebih baik dibandingkan dengan KAP yang hanya melakukan pekerjaan *auditing* pada perusahaan lokal saja. Dengan pengalaman lebih, KAP *big-four* dianggap lebih berani serta lebih mampu untuk memengaruhi perusahaan dalam hal pelaporan keuangan, termasuk dalam luas pengungkapan pada laporan keuangan. Dari faktor tersebut, KAP berukuran besar diharapkan lebih dalam hal membantu perusahaan mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi perusahaan pada laporan keuangan perusahaan yang menjadi klien mereka.

Menurut Ahmad (2017), KAP *big-four* memiliki kemampuan untuk mengungkapkan informasi yang lebih baik dibandingkan KAP non *big-four* serta memiliki kekuatan untuk mempengaruhi tingkat pengungkapan perusahaan. Dalam kaitannya dengan pengungkapan transaksi pihak berelasi sendiri ukuran KAP masih menjadi salah satu faktor yang dipertanyakan apakah auditor dari KAP yang besar akan dapat memberikan pengaruh lebih pada keputusan perusahaan dalam pengungkapan transaksi pihak berelasi.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana tingkat efektifitas komite audit, komisaris independen, serta ukuran KAP dalam memengaruhi kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Permasalahan penyalahgunaan transaksi berelasi untuk tujuan oportunistik seperti *tunneling* masih rawan terjadi di Indonesia.
2. Struktur kepemilikan keluarga dan grup pada perusahaan di Indonesia mengakibatkan banyak terjadinya transaksi berelasi.
3. Lemahnya kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi menyulitkan pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah transaksi berelasi perusahaan bersifat ekonomis atau oportunistik.

4. Masih belum maksimalnya penerapan *good corporate governance* pada perusahaan di Indonesia.
5. Masih banyaknya perusahaan yang belum mencukupi syarat minimal anggota komite audit serta komisaris independen dalam perusahaan.
6. Pengaruh KAP berukuran besar terhadap luas pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi masih dipertanyakan.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, bahasan pokok yang menjadi sorotan utama yaitu bagaimana pengaruh komite audit, komisaris independen, dan ukuran KAP pada tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi. Penelitian ini berfokus pada laporan keuangan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan hanya akan dibahas hal-hal terkait dengan variabel penelitian sesuai dengan peraturan yang ada dalam PSAK nomor 7 tahun revisi 2015.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi?
3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi?

4. Apakah komite audit, komisaris independen, dan ukuran KAP secara bersama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah perusahaan-perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 telah melaporkan transaksi berelasi mereka sesuai dengan yang telah diatur dalam PSAK nomor 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.
2. Untuk mengetahui apakah komite audit, komisaris independen, dan ukuran KAP mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi sesuai dengan PSAK nomor 7.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti mengenai laporan keuangan, khususnya laporan terkait pengungkapan transaksi berelasi yang diharapkan akan dapat membantu dikemudian hari.

2. Bagi investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat membantu para investor serta *stakeholder* dalam mengambil keputusan terkait investasi pada suatu perusahaan.

3. Bagi universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi terkait pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi pada laporan keuangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Agensi

Teori agensi merupakan suatu konsep yang menjelaskan mengenai hubungan kontraktual antara *principal* dan *agents*. Contoh teori agensi yang ada dalam perusahaan yaitu hubungan antara pemegang saham sebagai *principal* dengan manajemen sebagai *agen*. Manajemen yang ditunjuk oleh pemegang saham memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya pada pemegang saham. Menurut Raharjo (2007), teori agensi terfokus pada dua individu yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal mendelegasikan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional yang semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. Hak dan kewajiban dari prinsipal dan agen dijelaskan dalam sebuah perjanjian kerja yang saling menguntungkan. Dalam penelitian akuntansi manajemen, teori agensi digunakan untuk mengidentifikasi kombinasi kontrak kerja dan sistem informasi yang akan memaksimalkan fungsi manfaat prinsipal, dan kendala-kendala perilaku yang muncul dari kepentingan agen.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika prinsipal mempekerjakan agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Agen adalah pihak yang mengelola perusahaan seperti manajer perusahaan atau dewan direksi sebagai pembuat keputusan dalam perusahaan. Sementara untuk prinsipal adalah pihak yang nantinya akan mengevaluasi informasi, seperti pemegang saham. Jika agen dan prinsipal tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk sesuai keinginan prinsipal untuk kepentingan prinsipal.

2. *Corporate Governance*

Berdasarkan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001), *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan para *stakeholder* lain yang berkaitan dengan hak-hak serta kewajiban mereka, atau dengan kata lain *corporate governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. FCGI (2001) menilai bahwa *corporate governance* dapat memberikan beberapa manfaat antara lain : (1) Dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih

meningkatkan pelayanan kepada para *stakeholder*, (2) Memudahkan dalam memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah yang nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan, (3) mengembalikan kepercayaan investor, (4) investor akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholder value* dan dividen. Menurut FCGI (2001), terdapat empat prinsip dasar penerapan *good corporate governance*, yaitu : (1) keadilan (*fairness*), (2) transparansi (*transparency*), (3) akuntabilitas (*accountability*), dan (4) pertanggungjawaban (*responsibility*).

3. Transaksi Pihak Berelasi

Berdasarkan PSAK nomor 7 paragraf 9, yang dimaksud transaksi pihak berelasi adalah pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Menurut Sari dan Sugiharto (2014), pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor.
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor.
 - c. Personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi satu hal berikut:
- a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - c. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas lain adalah asosiasi dari entitas ketiga.
 - d. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu pelapor atau entitas terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - e. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam poin (1.).
 - f. Orang yang diidentifikasi dalam poin (1.) (a.) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Berdasarkan definisi diatas, pihak berelasi adalah pihak (orang ataupun entitas) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap suatu perusahaan dan bahkan memiliki kendali atas perusahaan tersebut. Pengaruh signifikan dapat diperoleh melalui kepemilikan saham, anggaran dasar, atau perjanjian (PSAK No. 7). Pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut (PSAK No. 7).

4. Struktur Kepemilikan Perusahaan

Struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Struktur kepemilikan tersebar. Pada struktur tersebar, pemegang saham secara individual tidak dapat mengendalikan manajemen agar berindak selaras dengan kepentingan pemegang saham.
- b. Struktur kepemilikan terkonsentrasi. Pada struktur terkonsentrasi terdapat pemegang saham yang dapat mengendalikan atau bahkan menjadi bagian dari manajemen itu sendiri.

Dari kedua struktur kepemilikan tersebut nantinya akan berefek pada proses pengambilan keputusan dalam perusahaan. Misalnya dalam struktur kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham dapat memilih dan melantik manajer perusahaan tersebut dan pemegang saham lain hanya memiliki kewenangan yang kecil atau bahkan tidak mempunyai kewenangan dalam

pemilihan manajer. Pada perusahaan terkonsentrasi, pemegang saham pengendali dapat mengendalikan atau bahkan menjadi bagian dari manajemen itu sendiri.

Pemegang saham pengendali dapat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memengaruhi keputusan yang akan diambil yang berpihak pada kepentingannya. Dengan pengaruh yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, mereka dapat mengambil kebijakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri, termasuk kebijakan dalam hal transaksi dengan pihak berelasi. Hal tersebut yang membuat besarnya risiko akan terjadinya *tunneling* melalui pihak berelasi.

5. Komite Audit

Keberadaan komite audit saat ini mulai diperhatikan dalam pengelolaan perusahaan yang sehat. Suaryana (2005) menyatakan bahwa komite audit memiliki tugas untuk membantu dewan komisaris dalam memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen guna meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Tugas dari komite audit itu sendiri yaitu menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, komite audit akan berinteraksi secara formal antara dewan, manajemen, audit eksternal, dan audit internal yang nantinya bertujuan untuk menjamin proses audit internal dan audit eksternal dilakukan dengan baik. Proses audit internal

serta audit internal yang baik akan meningkatkan akurasi laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Komite audit juga bertugas sebagai pihak penengah apabila terjadi perselisihan antara manajemen dengan auditor dalam interpretasi dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk mencapai keseimbangan akhir, sehingga laporan lebih akurat.

Keberadaan komite audit diharapkan dapat memberikan peran penting dalam rangka penerapan *good corporate governance*. Menurut Chrisdianto (2013), komite audit pada dasarnya mampu mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan berbagai pengembangan berkaitan dengan upaya-upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*. Kemampuan komite audit untuk memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*, membuat cita-cita untuk menciptakan *good corporate governance* bukan hanya cita-cita yang tertulis saja tetapi sungguh-sungguh dapat diwujudkan.

Peran komite audit untuk menciptakan *good corporate governance* melalui pemenuhan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat dipahami dari pembahasan yang dipaparkan sebagai berikut ini:

a. Peran komite audit memenuhi prinsip *fairness* (kesetaraan)

Manajemen perusahaan dalam kegiatan operasional yang dilakukan membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak. Dalam

rangka menjalin kerjasama yang baik, manajemen perusahaan hendaknya berlaku adil terhadap seluruh pihak yang ada, dimana tidak ada pihak yang lebih dipentingkan, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemampuan untuk berlaku *fair* kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kerja sama membuat manajemen perusahaan terhindar dari tuntutan pihak tertentu yang dirugikan.

- b. Peran komite audit memenuhi prinsip *responsibility* (pertanggungjawaban)

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional dibatasi oleh adanya aturan yang harus ditaati agar perusahaan juga melakukan bisnis yang sehat, bukan untuk kepentingan perusahaan sendiri tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika dalam bisnis. Keberadaan komite audit di perusahaan diharapkan dapat mengarahkan perusahaan agar melakukan bisnis yang sehat, sebab dengan adanya komite audit ada pengawasan bagi operasional bisnis perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dengan tujuan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

- c. Peran komite audit memenuhi prinsip *accountability* (akuntabilitas)

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip wajib dalam *good corporate governance*, dimana ada rincian terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dalam rangka

mengembangkan bisnis perusahaan. Komite audit memiliki peran untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dalam usaha melakukan pengawasan terhadap proses manajemen risiko dan keberlangsungan fungsi pengawasan di perusahaan.

Komite audit memiliki kekuasaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan dari auditor internal perusahaan. Dalam hal tersebut, komite audit memiliki kesempatan untuk melakukan peninjauan terhadap struktur organisasi dan deskripsi kerja masing-masing bagian di perusahaan, beserta dengan sistem pengendalian internal yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Manfaat lain dari peran komite audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan auditor internal adalah dapat meninjau anggota manajemen yang harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kecurangan, sehingga dengan demikian upaya untuk menciptakan kejelasan akuntabilitas di perusahaan semakin jelas dengan keberadaan komite audit.

- d. Peran komite audit memenuhi prinsip *transparency* (keterbukaan informasi)

Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit merupakan pengawasan menyeluruh tentang hal hal yang dilakukan oleh dewan direksi dalam menjalankan operasional perusahaan. Pengawasan menyeluruh bukan hanya pada laporan keuangan, namun juga

perilaku-perilaku yang ada saat menjalankan operasional perusahaan. Tugas komite audit tersebut pada akhirnya akan mendorong direksi untuk lebih terbuka terhadap informasi yang dimiliki. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit akan membuat ada banyak informasi yang dilaporkan atau diungkapkan, sehingga sesuai dengan informasi tersebut tidak ada pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan (*stakeholder*) yang dirugikan.

6. Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari *corporate governance*. Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian internal tertinggi yang memiliki tugas untuk mengawasi tindakan manajemen puncak. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Menurut Sari dan Sugiharto (2014) Dewan komisaris adalah suatu kelompok individu yang dipilih oleh para pemegang saham yang menjalankan tugas legal untuk menetapkan tujuan-tujuan perusahaan, mengembangkan kebijakan-kebijakan secara luas, dan memilih personel manajemen level puncak untuk menjalankan tujuan-tujuan dari kebijakan tersebut. Dewan komisaris juga *me-review* kinerja manajemen untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan dengan baik dan kepentingan pemegang saham terproteksi.

Komisaris Independen sebagai bagian dari dewan komisaris memiliki tugas sentral dalam membantu dewan memenuhi fungsi pengawasan transaksi berelasi. Keputusan independen merupakan hal utama dalam mengawasi transaksi berelasi serta dalam meyakinkan para pengguna laporan terutama *stakeholder* bahwa transaksi berelasi tersebut adalah untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

Mizdareta (2015) menyebutkan terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai dewan komisaris independen perusahaan, antara lain disebutkan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan pedoman *good corporate governance* perbankan di Indonesia. Dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas tersebut disebutkan bahwa dalam sebuah PT wajib memiliki dewan komisaris paling sedikit adalah 2 (dua) anggota dewan komisaris dan jumlah komisaris independen minimal 30% dari total komisaris. Dalam perbankan, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* di lingkungan perbankan. Berdasarkan peraturan tersebut, jumlah komisaris independen adalah paling sedikit 50% dari total komisaris yang ada. Kewajiban adanya komisaris independen minimal 50% dari total komisaris ini tidak melihat apakah yang bersangkutan telah *go public* atau belum.

7. Ukuran KAP

Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four* atau KAP internasional dianggap cenderung memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil, serta lebih independen terhadap klien. Dalam segi kualitas, Ahmad (2017) menjelaskan bahwa KAP *big-four* memiliki kemampuan untuk mengungkapkan informasi yang lebih baik dibandingkan KAP non *big-four* serta memiliki kekuatan untuk mempengaruhi tingkat pengungkapan perusahaan. Menurut Rossietta dan Wibowo (2009), ada empat kelebihan skala auditor, yaitu:

1. Besarnya jumlah dan ragam klien yang ditangani KAP,
2. Banyaknya ragam jasa yang ditawarkan,
3. Luasnya cakupan geografis, termasuk adanya afiliasi internasional,
4. Banyaknya jumlah staf audit dalam suatu KAP.

Hamid (2013) membedakan ukuran KAP menjadi dua, yaitu KAP *big four & internasional* dan KAP *non-big four & Non-internasional*, diukur berdasarkan porsi KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four* dan internasional dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP *big four* dan internasional.

Ukuran KAP juga dapat diukur melalui jumlah rekan, jumlah auditor, jumlah klien, dan jumlah pendapatan. Menurut Halim (2008) hirarki staf organisasi KAP pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Partner, merupakan *top legal client relationship*, yang bertugas *me-review* (menelaah) pekerjaan audit, menandatangani laporan audit, menyetujui masalah *fee* dan penagihannya, dan penanggungjawab atas segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit.
2. Manajer, merupakan staf yang banyak berhubungan dengan klien, mengawasi langsung pelaksanaan tugas-tugas audit, *me-review* lebih rinci terhadap pekerjaan audit, dan melakukan penagihan atas *fee* audit.
3. Akuntan senior, merupakan staf yang bertanggungjawab langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit dan *me-review* pekerjaan para akuntan junior yang dibawahnya.
4. Akuntan junior merupakan staf pelaksana langsung dan bertanggungjawab atas pekerjaan lapangan. Para junior ini penugasannya dapat berupa bagian-bagian dari pekerjaan audit, dan bahkan bila memungkinkan memberikan pendapat atas bagian yang diperiksanya.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Heni Werdi Apriani (2015) dengan judul “Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Penungkapan Transaksi Pihak Berelasi Indonesia”

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh dari *corporate governance* dan karakteristik perusahaan pada luas pengungkapan transaksi pihak

berelasi di Indonesia. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu konsentrasi kepemilikan, komisaris independen, tingkat diversifikasi perusahaan, dan profitabilitas. Variabel dependennya yaitu pengungkapan transaksi pihak berelasi. Dalam menganalisa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, digunakan dua variabel control yaitu jenis perusahaan dan ukuran perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan tahunan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. Metode statistik yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Analisis ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi, sementara tingkat konsentrasi kepemilikan, tingkat diversifikasi perusahaan, dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan transaksi pihak terkait. Penelitian Heni Werdi Apriani memiliki persamaan dengan penelitian ini pada bagaimana bagian dari *good corporate governance* dapat memengaruhi luas pengungkapan transaksi berelasi.

2. Rudi Ahmad (2017) dengan judul “Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka *Integrated Reporting*”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP terhadap tingkat keselarasan laporan tahunan dengan rerangka *Integrated Reporting* (IR). Pemilihan variabel

penelitian ini adalah perusahaan sector pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2015. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan diperoleh sebanyak 64 sampel selama dua tahun pengamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat keselarasan laporan tahunan dengan rerangka IR. Persamaan yang ada pada penelitian ini yaitu pada bagaimana komite audit dan ukuran KAP dapat berpengaruh dalam mendorong pelaporan keuangan yang lebih baik.

3. Vera Dyanty, dkk (2012) dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Pengendali Akhir Terhadap Transaksi Pihak Berelasi”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pengendali : pengaruh *entrenchment* dan *alignment* terhadap transaksi pihak berelasi dengan kepemilikan keluarga dan praktek *corporate governance* sebagai variabel moderator. Penelitian ini berpendapat bahwa salah satu bentuk pengambilalihan kepemilikan pengendali termasuk dalam transaksi berelasi. Metode regresi panel data digunakan untuk menguji hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi berelasi dipengaruhi oleh *entrenchment* secara positif dan *alignment* secara negatif. Kepemilikan keluarga akan memperkuat efek *entrenchment* dan *corporate governance* akan menurunkan efek *entrenchment*. Persamaan dengan penelitian ini

adalah sama-sama meneliti pengaruh suatu variabel independen terhadap tingkat pengungkapan transaksi berelasi.

4. Desriana Juvita dan Sylvia Veronica Siregar (2013) dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Hubungan Besaran dan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Dengan Manajemen Laba : Studi Empiris Perubahan PSAK No. 7”

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh efektifitas dewan komisaris dan komite audit mengenai jumlah transaksi dengan pihak berelasi dan pengungkapan tentang manajemen laba. Penelitian ini menggunakan 86 sampel perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam sector manufaktur pada tahun 2010 dan 2011 untuk melihat perbandingan perubahan dalam PSAK No. 7. Hasilnya menunjukkan bahwa dewan komisaris dan komite audit melemahkan hubungan antara jumlah transaksi berelasi dan manajemen laba. Selain itu pengungkapan transaksi berelasi menurut PSAK No. 7 dan Bapepam-LK melemahkan hubungan antara transaksi berelasi dan *earning management*. Persamaan penelitian ini terletak pada hubungan antara *corporate governance* dengan pengungkapan transaksi berelasi.

C. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi berdasarkan PSAK 7

Komite audit merupakan komite yang dibuat untuk membantu dewan komisaris dalam memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen guna meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Selain tugas tersebut, komite audit juga merupakan salah satu tokoh dalam perusahaan yang memiliki peran penting dalam menciptakan *good corporate governance* bagi perusahaan. Dalam penelitian Ahmad (2017) menemukan bahwa komite audit dapat secara signifikan memengaruhi keselarasan laporan tahunan dengan kerangka *integrated reporting*. Dalam penelitian ini akan diteliti apakah komite audit juga dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi berdasarkan PSAK nomor 7 tahun 2015.

2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi berdasarkan PSAK 7

Dewan komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Komisaris Independen sebagai bagian dari dewan komisaris memiliki tugas sentral dalam membantu dewan memenuhi fungsi pengawasan transaksi berelasi. Sebagai perwakilan dari para *stakeholder*, komisaris independen diharapkan dapat memastikan tidak ada informasi yang disembunyikan

dalam pelaporan keuangan dan dapat mendorong tingkat pengungkapan transaksi berelasi perusahaan. Dalam penelitian Mizdareta (2015) menghasilkan kesimpulan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Dalam penelitian ini, akan diteliti apakah komisaris independen juga dapat mempengaruhi pengungkapan transaksi berelasi sesuai dengan PSAK nomor 7 tahun 2015.

3. Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi berdasarkan PSAK 7

Keberadaan auditor dalam proses audit diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Auditor dari kantor akuntan publik (KAP) berukuran besar seperti *big four* yang memiliki kelebihan dalam hal kuantitas serta kualitas dianggap memiliki integritas lebih pada laporan keuangan yang diaudit dibandingkan dengan hasil audit KAP yang lebih kecil dikarenakan KAP berukuran besar akan cenderung lebih independen terhadap para kliennya. Kelebihan dari KAP *big four* salah satunya yaitu *big four* telah memiliki kantor akuntan yang tersebar diberbagai negara sehingga memiliki pengalaman lebih dibandingkan dengan KAP kecil yang melakukan audit hanya terhadap perusahaan-perusahaan lokal. KAP berukuran besar mempunyai kemampuan untuk memberikan saran-saran kepada perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi perusahaan

melalui laporan keuangan perusahaan, salah satunya yaitu membantu memperluas pengungkapan transaksi perusahaan dengan pihak berelasi pada laporan keuangan tahunan milik perusahaan. Dalam penelitian Ahmad (2017) menghasilkan kesimpulan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap keselarasan laporan tahunan dengan kerangka *integrated reporting*. Dalam penelitian ini, akan diteliti apakah ukuran KAP dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi sesuai dengan PSAK nomor 7 tahun 2015.

4. Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi berdasarkan PSAK 7

Tingkat kepatuhan perusahaan dalam mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi tentunya memiliki faktor-faktor yang tingkat pengungkapan tersebut. Dari berbagai faktor yang mungkin memengaruhi, diantaranya yaitu terdapat faktor komite audit, komisaris independen, serta ukuran kantor akuntan publik.

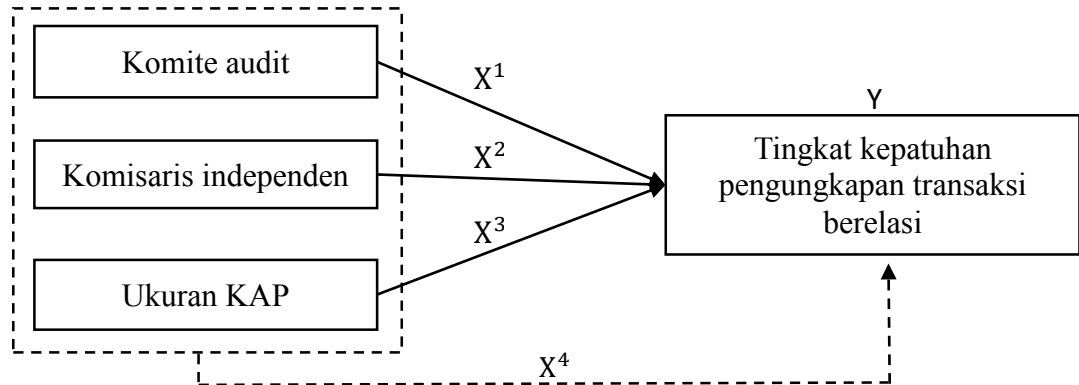
Komite audit yang memiliki tugas untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen guna meningkatkan kredibilitas laporan keuangan akan dapat memengaruhi tingkat pengungkapan pada laporan keuangan perusahaan melalui pengawasan yang mereka lakukan pada proses pelaporan keuangan.

Komisaris independen sebagai salah satu bagian dari dewan komisaris bertanggung jawab dalam mewujudkan *good corporate governance* dalam perusahaan. Komisaris independen diharapkan mengarahkan perusahaan untuk membuat keputusan yang memenuhi prinsip transparansi dengan memperluas tingkat pengungkapan pada laporan keuangan perusahaan.

Selain pengaruh dari dalam perusahaan, juga terdapat pengaruh dari luar seperti melalui kantor akuntan publik. KAP besar seperti *bigfour* yang telah memiliki nama baik di berbagai negara akan sangat diandalkan untuk dapat mendorong agar laporan keuangan yang disajikan perusahaan telah sesuai dengan yang dibutuhkan para *stakeholder* tentang apa yang benar-benar terjadi pada perusahaan secara transparan.

Dari penjelasan singkat diatas dapat dikatakan bahwa komite audit, komisaris independen, dan ukuran KAP dapat memengaruhi tingkat pengungkapan transaksi berelasi perusahaan secara teori. Dalam penelitian ini, akan dibahas apakah komite audit, komisaris independen, dan ukuran KAP secara bersama-sama dapat memengaruhi tingkat pengungkapan transaksi berelasi sesuai dengan PSAK nomor 7 tahun 2015.

D. Paradigma Penelitian



Keterangan:

—————▶ = Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

-----▶ = Pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama

X^1, X^2, X^3 = Variabel independen

X^4 = Seluruh variabel independen

Y = Variabel dependen

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir dan paradigma penelitian diatas, hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H1 : Komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi.

H2 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi.

H3 : Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi.

H4 : Komite audit, komisaris independen, dan ukuran KAP secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis atau Desain Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian kausal komparatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya (Widarto, 2013). Dalam penelitian ini, variabel yang dimaksud yaitu komite audit, komisaris independen, dan ukuran KAP terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi.

Data yang digunakan merupakan data sekunder dan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi berupa *annual report* yang dikeluarkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data-data tersebut diperoleh dari pusat referensi pasar modal Bursa Efek Indonesia, website resmi BEI (www.idx.co.id), serta website perusahaan terkait.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan tahunan tersebut akan diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu <http://www.idx.co.id>. Kemudian, untuk pengolahan data laporan keuangan dilakukan pada Maret 2018 hingga April 2018.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Uma Sekaran (2006), populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2016.

2. Sampel

Sampel menurut Uma Sekaran (2006) merupakan sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah, tapi tidak semua, elemen populasi akan membentuk sampel. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu atau pertimbangan peneliti. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

1. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 yang merupakan tahun laporan keuangan terbaru pada saat penelitian ini dibuat.
2. Perusahaan termasuk kedalam sektor pertambangan dan pertanian pada tahun tersebut dikarenakan kedua sektor tersebut merupakan sektor utama atau sektor penghasil bahan baku (www.sahamok.com) yang

menurut peneliti bahan baku dinilai memiliki kemungkinan lebih tinggi terjadinya transaksi berelasi dengan tujuan oportunistis.

3. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk tahun tersebut.
4. Perusahaan yang memiliki pihak berelasi selama tahun tersebut.

D. Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu kepatuhan pengungkapan yang dinotasikan dengan simbol Y, serta variabel independen dalam penelitian ini yaitu komite audit, komisaris independen, dan ukuran KAP dinotasikan dengan simbol X. Variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi. Tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi yang dimaksud yaitu dalam melaporkan transaksi berelasi perusahaan sesuai dengan standar PSAK 7 yang berlaku. Poin pengungkapan yang harus diungkapkan dalam PSAK nomor 7 tahun 2015 yaitu:

- a) Sifat dari hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

- b) Informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan.
- c) Sekurang-kurangnya, pengungkapan meliputi:
1. Nilai transaksi.
 2. Jumlah saldo, termasuk komitmen.
 3. Penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut.
 4. Beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Pengukuran tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi yaitu dengan membandingkan antara jumlah pengungkapan perusahaan dengan total pengungkapan yang diatur dalam PSAK 7.

$$Y = \frac{\text{Nilai pengungkapan}}{\text{Total pengungkapan di PSAK}}$$

Berdasarkan poin-poin yang harus diungkapkan menurut PSAK nomor 7 tahun 2015, rincian dari total pengungkapan di PSAK yang akan digunakan dalam penelitian ini sendiri yaitu:

1. Sifat hubungan dengan pihak berelasi (PSAK 7 paragraf 13)
2. Kompensasi personil manajemen kunci (PSAK 7 paragraf 17)
3. Jumlah transaksi (PSAK 7 paragraf 18)
4. Jumlah saldo (PSAK 7 paragraf 18)

5. Komitmen, termasuk syarat dan ketentuan, serta rincian jaminan (PSAK 7 paragraf 18)
6. Penyisihan piutang-ragu-ragu (PSAK 7 paragraf 18)
7. Beban yang diakui dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak berelasi (PSAK 7 paragraf 18)

b. Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1. Komite Audit (X1)

Komite audit berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan termasuk dalam mengawasi laporan keuangan perusahaan untuk memastikan tidak ada penyelewengan. Menurut ketentuan, komite audit perusahaan minimal terdiri dari tiga orang, yaitu sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Pengukuran variabel Komite Audit sendiri dilakukan dengan menghitung jumlah anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan.

$$X1 = \text{Jumlah Komite Audit}$$

2. Komisaris Independen (X2)

Komisaris Independen adalah bagian dari dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai hubungan keluarga

dan hubungan bisnis dengan perusahaan. Dalam peraturan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 disebutkan suatu perusahaan wajib memiliki komisaris independen paling sedikit 30% dari jumlah dewan komisaris. Pada penelitian ini, pengukuran variabel komisaris independen dilakukan dengan menghitung jumlah komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengabaikan jumlah dewan komisaris.

$$X2 = \text{Jumlah Komisaris Independen}$$

3. Ukuran Kantor Akuntan Publik (X3)

Ukuran kantor akuntan publik (KAP) dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu KAP berukuran besar (*big four*) dan KAP berukuran kecil (*non big four*). Pengukuran variabel Ukuran KAP dilakukan dengan menggunakan variabel *dummy*. Perusahaan yang menggunakan KAP *big four* akan diberi kode satu (1) dan perusahaan yang menggunakan KAP *non big four* akan diberi kode nol (0) (Ahmad, 2017).

$$\begin{aligned} \text{KAP } big \text{ four} &= 1 \\ \text{KAP } non \text{ big four} &= 0 \end{aligned}$$

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode dokumentasi yang dilakukan dengan mengambil data laporan

keuangan perusahaan yang masuk ke dalam sampel dari penelitian untuk tahun laporan 2016 melalui situs web resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu *www.idx.co.id*. Pemilihan tahun 2016 sendiri dikarenakan tahun tersebut merupakan tahun laporan keuangan tahunan terbaru hingga penelitian ini dibuat.

F. Teknik Analisis Data

A. Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji pemenuhan persyaratan distribusi normal dari data residual dalam model regresi. Untuk mendeteksi apakah data telah terdistribusi secara normal atau tidak, yang perlu diperhatikan dalam pendeteksian normalitas yaitu besaran nilai signifikansi. Jika nilai dari signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data tersebut telah terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Suatu model regresi yang terindikasi terkena multikolinearitas akan sulit untuk dilihat pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Dalam uji multikolinearitas, yang perlu diperhatikan yaitu pada nilai *tolerance* dan VIF. Suatu data dapat dikatakan terbebas dari

masalah multikolinearitas apabila memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 serta nilai VIF lebih kecil dari 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamat ke pengamat lain. Dalam pengujian heteroskedastisitas, dianggap tidak terjadi heteroskedastisitas pada data apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05.

G. Pengujian Hipotesis

1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana yaitu:

1) Persamaan regresi linear sederhana

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y : Variabel terikat (Kepatuhan Pengungkapan)

X : Variabel bebas (Komite Audit, Komisaris Independen, dan Ukuran KAP)

a : Nilai konstanta

b : Koefisien regresi

2) Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji-t ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi parsial variabel independen terhadap variabel dependennya. Dalam uji-t, variabel independen dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila hasil nilai signifikansi t lebih kecil dari 0,05 untuk variabel komite audit dan komisaris independen, sementara untuk variabel ukuran KAP yang merupakan variabel *dummy* dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai dari signifikansi t lebih kecil dari 0,10 (Juvita dan Siregar, 2013).

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel bebas secara bersama terhadap satu variabel terikat. Langkah-langkah dalam melakukan regresi linear berganda yaitu:

1) Persamaan regresi linear berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi

a : Nilai konstanta

b : Koefisien regresi

X1 : Komite audit

X2 : Komisaris independen

X3 : Ukuran KAP

2) Uji-F

Uji-f ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dalam uji-f, variabel independen dianggap memiliki pengaruh secara bersama-sama yang signifikan terhadap variabel dependen apabila hasil nilai signifikansi f lebih kecil dari 0,05.

3. Uji Determinasi (r^2)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan pergerakan variabel dependen dalam persamaan/model yang akan diteliti. *R-square* (r^2) memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Semakin besar nilai dari *r-square*, maka semakin baik pula variabel independen tersebut dalam menjelaskan pergerakan variabel dependennya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Bab ini menganalisa hasil penelitian mengenai “Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Pada Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 7”. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang disediakan oleh pihak ketiga dengan metode pengumpulan yang digunakan adalah dengan pengumpulan data arsip. Data tersebut berupa laporan keuangan yang diperoleh dari pusat referensi pasar modal Bursa Efek Indonesia dalam website resminya yaitu www.idx.co.id.

Jumlah populasi dalam penelitian ini sendiri berjumlah 539, yaitu jumlah total perusahaan yang tercatat hingga tanggal 30 Desember 2016 di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2016. Dari jumlah tersebut kemudian diambil sebanyak 59 perusahaan yang merupakan perusahaan dalam sektor utama, yaitu sektor pertanian sebanyak 20 perusahaan dan sektor pertambangan sebanyak 39 perusahaan. Jumlah tersebut kemudian masih dikurangi kembali sebanyak 6 sampel yang dikarenakan perusahaan terkait tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk tahun 2016 serta sebanyak 1 perusahaan dikarenakan berelasi dengan pemerintahan. Sehingga

sampel akhir yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 52 sampel. Hasil seleksi sampel tersebut diringkas kembali ke dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Rincian Perusahaan Sektor Utama

SEKTOR UTAMA	Jumlah
SEKTOR PERTANIAN	
Perkebunan	16
Peternakan	0
Perikanan	3
Lainnya	1
TOTAL S. PERTANIAN	20
SEKTOR PERTAMBANGAN	
Batubara	21
Minyak & Gas Bumi	7
Logam & Mineral Lainnya	9
Batu-batuan	2
Lainnya	0
TOTAL S. PERTAMBANGAN	39
TOTAL SEKTOR UTAMA	59

Sumber : *www.sahamok.com*

Tabel 2. Hasil Seleksi Sampel

Kriteria Sampel	N
Perusahaan Terdaftar tahun 2016	539
Bukan Sektor Utama	(480)
Perusahaan Sektor Utama	59
Tidak Melaporkan LK	(6)
Tidak Memiliki PB/PB dengan Pemerintahan	(1)
Jumlah sampel yang digunakan	52

B. Deskripsi Variabel Penelitian

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Std. Dev.
Kepatuhan Pengungkapan	52	0	0,857	0,577	0,192
Komite Audit	52	0	4	2,827	0,785
Komisaris Independen	52	0	4	1,731	0,888
Ukuran KAP	52	0	1	0,423	0,499

Sumber : Data diolah, 2018

1. Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi

Tabel 3 menunjukkan untuk variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi memiliki nilai terendah 0 yang dimiliki oleh PT Inti Agri Resources Tbk. dan PT Perdana Karya Perkasa Tbk. yang berdasarkan jurnal pada laporan keuangan kedua perusahaan memiliki pihak berelasi namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait transaksi berelasi perusahaan, nilai tertinggi pengungkapan sebanyak 0,857 dimiliki oleh 8 perusahaan, dan nilai rata-rata kepatuhan pengungkapan sebesar 0,577.

Penentuan kecenderungan variabel tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi dapat dilakukan dengan menggunakan nilai terendah dan nilai tertinggi yang nantinya akan digunakan untuk mencari nilai rata-rata ideal (Mi) dan nilai standar deviasi (SDi). Pada variabel ini, nilai tertinggi yang akan digunakan yaitu 1, yang merupakan nilai tertinggi yang bisa didapatkan pada tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi, sehingga penghitungan untuk Mi dan SDi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
Mi &= 1/2 (\text{nilai tertinggi} + \text{nilai terendah}) \\
&= 1/2 (1 + 0) \\
&= 0,5
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
SDi &= 1/6 (\text{Nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}) \\
&= 1/6 (1 - 0) \\
&= 0,167
\end{aligned}$$

Selanjutnya setelah nilai rata-rata ideal dan nilai standar deviasi diketahui, data kemudian digolongkan menjadi 3 kategori (Arikunto, 2012) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\text{Tinggi} &= X > [Mi + 1(SDi)] \\
&= X > [(0,5) + 1(0,167)] \\
&= X > 0,667
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Sedang} &= [Mi - 1(SDi)] \leq X \leq [Mi + 1(SDi)] \\
&= [(0,5) - 1(0,167)] \leq X \leq [(0,5) + 1(0,167)] \\
&= 0,333 \leq X \leq 0,667
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Tinggi} &= X < [Mi - 1(SDi)] \\
&= X < [(0,5) - 1(0,167)] \\
&= X < 0,333
\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, hasil distribusi kecenderungan data variabel tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. Kecenderungan data tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Presentase
1	Tinggi	$X > 0,667$	17	32,7 %
2	Sedang	$0,333 \leq X \leq 0,667$	31	59,6 %
3	Rendah	$X < 0,333$	4	7,7 %
Jumlah			52	100 %

Sumber : Data diolah, 2018

Tabel 4 menunjukkan bahwa mayoritas sampel sebanyak 31 perusahaan (59,6%) memiliki tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi sedang, sementara sisanya terdapat 17 perusahaan (32,7%) dengan tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi tinggi dan 4 perusahaan (7,7%) dengan tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi rendah.

2. Komite Audit

Variabel independen pertama yaitu komite audit memiliki nilai terendah 0 yang dimiliki oleh 3 perusahaan, nilai tertinggi sebesar 4 yang juga dimiliki oleh 3 perusahaan, dan nilai rata-rata komite audit sebesar 2,827. Hasil penelitian menunjukkan persebaran komite audit sebagai berikut:

Tabel 5. Persebaran Komite Audit

No	Jumlah Komite Audit	Frekuensi	Presentase
1	<3	6	11,5 %
2	3	43	82,7 %
3	>3	3	5,8 %
Jumlah		52	100 %

Sumber : Data diolah, 2018

Tabel 5 menunjukkan terdapat 43 perusahaan yang memiliki jumlah komite audit sebanyak 3 orang yang merupakan jumlah minimum komite audit dalam perusahaan, sebanyak 6 perusahaan memiliki jumlah komite audit yang

belum memenuhi peraturan minimum, dan sebanyak 3 perusahaan memiliki jumlah anggota komite audit diatas jumlah minimum.

3. Komisaris Independen

Variabel independen kedua yaitu komisaris independen memiliki nilai terendah 0 yang dimiliki oleh PT BUMI Resources Tbk., nilai tertinggi sebesar 4 dimiliki oleh PT Delta Dunia Makmur Tbk. dan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk., dan nilai rata-rata komisaris independen sebesar 1,731. Hasil penelitian menunjukkan persebaran komisaris independen sebagai berikut:

Tabel 6. Persebaran Komisaris Independen

No	Jumlah Komisaris Independen	Frekuensi	Presentase
1	0	1	1,9 %
2	1	24	46,2 %
3	2	17	32,7 %
4	3	8	15,4 %
5	4	2	3,8 %
Jumlah		52	100 %

Sumber : Data diolah, 2018

Tabel 6 menunjukkan terdapat 24 perusahaan yang memiliki 1 komisaris independen, 17 perusahaan memiliki 2 komisaris independen, 8 perusahaan memiliki 3 komisaris independen, dan 2 perusahaan memiliki 4 komisaris independen, dan 1 perusahaan tidak memiliki komisaris independen,

4. Ukuran KAP

Variabel independen ketiga yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan variabel *dummy* dimana angka 1 yang menunjukkan bahwa

perusahaan tersebut menggunakan KAP yang berafiliasi dengan *bigfour* sementara angka 0 yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menggunakan KAP yang tidak berafiliasi dengan *bigfour*. Variabel ukuran KAP memiliki nilai rata-rata sebesar 0,423 diambil dari jumlah perusahaan yang menggunakan KAP yang berafiliasi dengan *bigfour* sebanyak 22 perusahaan dan jumlah perusahaan yang tidak menggunakan KAP yang berafiliasi dengan *bigfour* sebanyak 30 perusahaan.

Tabel 7. Persebaran Ukuran KAP

No	Ukuran KAP	Frekuensi	Presentase
1	<i>Bigfour</i>	22	42,3 %
2	<i>Non-bigfour</i>	30	57,7 %
Jumlah		52	100%

Sumber : Data diolah, 2018

C. Hasil Uji

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji pemenuhan syarat distribusi normal dari data residual dalam model regresi. Pendeteksian normalitas dilakukan dengan melihat besaran nilai signifikansi (*Sig.*). Jika nilai dari *Sig.* lebih kecil dari $Sig. < 0,5$ maka data tidak terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai $Sig. > 0,5$ maka data dapat dikatakan telah sesuai dengan syarat distribusi normal. Berikut ini adalah hasil dari uji analisis normalitas menggunakan teknik analisis *one-sample kolmogrov-smirnov test* :

Tabel 8. Hasil Uji Statistik Normalitas

Variabel	N	Signifikansi	Keterangan
Data Residual	52	0,200	Data terdistribusi secara normal

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, dapat diketahui nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, yaitu adanya hubungan linear antara variabel independen. Suatu model regresi yang terindikasi terkena multikolinearitas akan sulit untuk dilihat pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Pendeteksian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis nilai *tolerance* dan VIF. Jika nilai determinasi lebih besar dari $VIF > 10$ dan angka *tolerance* $< 0,10$, maka terjadi masalah multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF < 10 bersamaan dengan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka model regresi penelitian dianggap bebas dari masalah multikolinearitas. Berikut ini adalah hasil dari uji analisis multikolinearitas :

Tabel 9. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	Nilai VIF	Keterangan
Komite Audit (X1)	0,892	1,121	Tidak terjadi multikolinearitas
Komisaris Independen (X2)	0,928	1,078	Tidak terjadi multikolinearitas
Ukurang Kantor Akuntan Publik (X3)	0,890	1,124	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil analisis multikolinearitas diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel bernilai lebih kecil dari 10, dengan nilai *tolerance* dari masing-masing variabel bernilai lebih dari 0,10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas pada ketiga variabel.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamat ke pengamat lain. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode Glejser. Dalam metode Glejser model regresi dapat dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila probabilitas signifikansi variabel bernilai lebih dari 0,05. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode analisis Glejser:

Tabel 10. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Nilai Kritis	Keterangan
Komite Audit (X1)	0,382	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Komisaris Independen (X2)	0,701	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Ukuran Kantor Akuntan Publik (X3)	0,505	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah, 2018

Dari hasil analisis diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis

a. Hipotesis 1

H1 : Komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi

Pengujian hipotesis pertama (H1) dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil rangkuman dari analisis regresi linear sederhana dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 11. Hasil Regresi Linear Sederhana (X1)

Variabel	Koefisien Regresi	t Hitung	Sig.
Konstanta	0,316	-	-
Komite Audit (X1)	0,092	2,891	0,006
r : 0,378			
r square : 0,143			
N : 52			
Y : Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi			

Sumber : Data diolah, 2018

1) Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil persamaan untuk regresi linear sederhana sebagai berikut :

$$Y = 0,316 + 0,092 X1$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa konstanta memiliki nilai sebesar 0,316 yang artinya apabila variabel komite audit bernilai nol (0), maka nilai variabel kepatuhan pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebesar 0,316 satuan. Koefisien regresi komite audit (X1) sebesar 0,092 menunjukkan bahwa setiap kenaikan komite audit sebesar 1 satuan akan menaikkan tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi sebesar 0,092.

2) Uji Determinasi (*r square*)

Berdasarkan dari hasil uji regresi linear diatas menunjukkan arah model regresi ini adalah positif. Hal ini dapat dilihat dari koefisien korelasi (*r*) yang bernilai sebesar 0,378. Koefisien determinasi (*r square*) memiliki nilai sebesar 0,143 yang berarti variabel komite audit memiliki pengaruh sebesar 14,3% terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi, sedangkan sebesar 85,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

3) Uji t

Uji regresi linear sederhana untuk variabel komite audit menghasilkan nilai sigifikansi sebesar $0,006 < 0,05$. Hal ini

menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi. Koefisien korelasi (r) memiliki arah positif sebesar 0,378 sehingga hipotesis pertama (H1) yang menyatakan “Komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi” dapat diterima.

b. Hipotesis 2

H2 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi

Pengujian hipotesis kedua (H2) dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil rangkuman dari analisis regresi linear sederhana yang telah dilakukan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Regresi Linear Sederhana (X2)

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig.
Konstanta	0,512	-	-
Komisaris Independen (X2)	0,037	1,244	0,219
r : 0,173			
<i>r square</i> : 0,030			
N : 52			
Y : Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi			

Sumber : Data diolah, 2018

1) Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel memiliki nilai signifikansi t lebih besar dari 0,05

sehingga persamaan garis regresi untuk hipotesis kedua dianggap tidak ada. Azwar (2005) menjelaskan bahwa saat hasil analisis menunjukkan tidak signifikan, maka nilai dari variabel terkait (komisaris independen) harus diabaikan.

2) Uji Determinasi (*r square*)

Berdasarkan dari hasil uji regresi linear diatas menunjukkan arah model regresi ini adalah positif. Hal ini dapat dilihat dari koefisien korelasi (*r*) yang bernilai positif sebesar 0,173. Koefisien determinasi (*r square*) memiliki nilai sebesar 0,030 yang berarti variabel komisaris independen memiliki pengaruh sebesar 3% terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi, sedangkan sebesar 97% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Namun, dikarenakan variabel komisaris independen tidak signifikan, maka dapat dianggap bahwa pengaruh 3% tersebut dianggap tidak ada atau dalam kata lain menjadi 0%.

3) Uji T

Uji regresi linear sederhana untuk variabel komisaris independen menghasilkan nilai T hitung sebesar 1,244 dan sigifikansi sebesar $0,219 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi. Sehingga hipotesis kedua (H2) yang menyatakan “Komisaris independen

berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi” tidak didukung karena tidak berpengaruh signifikan.

c. Hipotesis 3

H3 : Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi

Pengujian hipotesis ketiga (H3) dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil rangkuman dari analisis regresi linear sederhana yang telah dilakukan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Regresi Linear Sederhana (X3)

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig.
Konstanta	0,533	-	-
Ukuran KAP (X3)	0,103	1,967	0,055
r : 0,268			
r square : 0,072			
N : 52			
Y : Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi			

Sumber : Data diolah, 2018

1) Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil persamaan untuk regresi linear sederhana sebagai berikut :

$$Y = 0,533 + 0,103 X3$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa konstanta memiliki nilai sebesar 0,533 yang artinya apabila variabel ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai nol (0) atau dapat diartikan bahwa kantor akuntan

publik yang digunakan oleh perusahaan bukan merupakan afiliasi *bigfour*, maka nilai variabel kepatuhan pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebesar 0,533 satuan. Koefisien regresi ukuran kantor akuntan publik (X3) sebesar 0,103 menunjukkan bahwa kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan *bigfour* akan menaikkan tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi sebesar 0,103.

2) Uji Determinasi (*r square*)

Berdasarkan dari hasil uji regresi linear diatas menunjukkan arah model regresi ini adalah positif. Hal ini dapat dilihat dari koefisien korelasi (*r*) yang bernilai sebesar 0,268. Koefisien determinasi (*r square*) memiliki nilai sebesar 0,072 yang berarti variabel ukuran kantor akuntan publik memiliki pengaruh sebesar 7,2% terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi, sedangkan sebesar 92,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

3) Uji t

Uji regresi linear sederhana untuk variabel ukuran kantor akuntan publik menghasilkan nilai t hitung = 1,967 dan nilai sigifikansi sebesar $0,055 < 0,10$. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi. Sehingga hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan “Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi” didukung.

d. Hipotesis 4

H4 : Komite audit, komisaris independen, dan ukuran KAP secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi

Pengujian hipotesis keempat (H4) dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil rangkuman dari analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi
Konstanta	0,306
Komite Audit	0,077
Komisaris Independen	0,015
Ukuran KAP	0,062
R	0,419
<i>R square</i>	0,175
<i>Adjusted r square</i>	0,124
F hitung	3,397
<i>Sig. F</i>	0,025

Sumber : Data diolah, 2018

1) Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil persamaan untuk regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 0,306 + 0,077 X_1 + 0,015 X_2 + 0,062 X_3$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa konstanta memiliki nilai sebesar 0,306 yang berarti apabila komite audit, komisaris

independen, dan ukuran KAP sama-sama memiliki nilai nol (0), maka nilai dari tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebesar 0,306 satuan. Koefisien regresi variabel pertama, yaitu komite audit menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,077 yang berarti tiap 1 nilai pada X1 akan menambah jumlah pada Y sebesar 0,077. Sama halnya dengan komisaris independen dan ukuran KAP yang menghasilkan nilai koefisien masing-masing adalah 0,015 dan 0,062 yang berarti tiap kenaikan 1 nilai pada X2 akan menambahkan nilai sebesar 0,015 pada Y dan tiap kenaikan 1 nilai pada X3 akan memberikan tambahan nilai sebesar 0,062 pada Y.

2) Uji Determinasi (*r square*)

Berdasarkan tabel 14 diatas, hasil yang diperoleh pada nilai korelasi (*r*) bernilai positif, yaitu sebesar 0,419 dengan *r square* yang dihasilkan sebesar 0,175. Dari hasil ini dapat diartikan bahwa komite audit, komisaris independen, dan ukuran KAP secara bersama-sama memengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi sebesar 17,5%, sedangkan sisanya sebesar 82,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

3) Uji F

Berdasarkan tabel 14 diatas, hasil analisis data yang telah dilakukan menghasilkan nilai F hitung sebesar 3,397 dan

signifikansi f sebesar 0,025. Dengan hasil signifikansi lebih kecil dari 0,050 ($0,025 < 0,050$), maka dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan “Komite Audit, Komisaris Independen, dan Ukuran KAP Secara Bersama-Sama Berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi” diterima.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik pada Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 7. Berdasarkan hasil analisis diatas, maka pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh komite audit terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis pertama, yaitu “komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi” diterima. Hasil penelitian ini telah sesuai dan mendukung teori yang menyebutkan tugas komite audit yang merupakan bagian dari *good corporate governance* adalah untuk membantu dewan komisaris dalam memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen guna meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Fungsi komite audit yang memberikan pengawasan lebih pada manajemen dapat mendorong tingkat pengungkapan informasi perusahaan dalam laporan

keuangan, termasuk pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi. Dengan makin banyaknya jumlah anggota komite audit, maka akan dapat menghasilkan tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi yang makin tinggi pula.

Hasil ini sesuai dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Rudy Ahmad (2017) yang menyatakan bahwa komite audit berperan dalam mengawasi manajemen sehingga tidak akan melakukan tindak penyelewengan termasuk dalam transaksi dengan pihak berelasi. Prinsip tanggung jawab dapat dijalankan oleh komite audit dengan mengarahkan perusahaan untuk memberikan informasi yang sebenarnya dan cakupan pengungkapan yang lebih luas.

2. Pengaruh komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis kedua, yaitu “Komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi” tidak didukung. Hasil ini tidak konsisten dengan teori yang menyatakan bahwa komisaris independen yang merupakan bagian dari *good corporate governance* memiliki tugas sentral dalam pengawasan terhadap manajemen dengan tujuan agar kinerja manajemen berjalan dengan baik termasuk dalam pelaporan transaksi berelasi. Tidak didukungnya hipotesis ini dapat disebabkan karena belum kuatnya peraturan yang diterapkan yang dapat dilihat dari masih adanya

beberapa perusahaan yang belum memenuhi syarat minimum jumlah anggota pada komisariss independen, serta masih kurang maksimalnya peran komisariss independen dalam mengarahkan luas pengungkapan laporan keuangan termasuk luas pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Heni Werdi Apriani (2015) yang menyatakan bahwa walau BAPEPAM – LK telah mengatur jumlah minimal komisariss independen dalam dewan komisariss, namun belum ada mekanisme penunjukan komisariss independen, sehingga dapat memunculkan potensi beberapa pihak untuk melakukan kecurangan (*fraud*) dengan menunjuk anggota komisariss independen yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan komisariss, dengan adanya *fraud* dalam anggota komisariss independen tentunya menyebabkan hasil kinerja komisariss independen tidak sesuai dengan yang diharapkan yang juga akan berdampak pada tidak maksimalnya tingkat pengungkapan transaksi berelasi pada laporan keuangan perusahaan.

3. Pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis ketiga, yaitu “Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi” didukung. Variabel ukuran kantor akuntan publik memiliki signifikansi sebesar 0,055 yang lebih kecil dari 0,10 sehingga variabel ukuran kantor akuntan publik dinilai memiliki

pengaruh yang signifikan pada tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi. Kantor akuntan *bigfour* yang memiliki pengalaman lebih dibandingkan dengan KAP *non-bigfour* dapat mendorong kualitas pelaporan keuangan perusahaan, seperti dengan cara memengaruhi luas pengungkapan pada laporan keuangan perusahaan. Dengan kemampuan serta pengalaman dari KAP *bigfour* yang dapat meningkatkan tingkat kepercayaan perusahaan terhadap akuntan dari *bigfour* yang bertugas pada perusahaan tersebut tentu akan memudahkan diterimanya pendapat serta saran dari akuntan tersebut oleh perusahaan yang nantinya dapat memengaruhi pengambilan keputusan terkait pelaporan keuangan perusahaan tersebut termasuk dalam luas pengungkapan transaksi berelasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rudy Ahmad (2017) yang menyatakan bahwa KAP yang berukuran besar cenderung lebih independen terhadap kliennya dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi luas pengungkapan transaksi perusahaan dengan memberikan saran pada manajemen terkait luas pengungkapan laporan keuangan perusahaan.

4. Pengaruh komite audit, komisaris independen, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis keempat, yaitu “Komite audit, komisaris independen, dan ukuran KAP secara bersama-

sama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi” diterima. Dalam proses pelaporan keuangan, komisaris independen serta komite audit memiliki tanggung jawab untuk mengawasi agar tidak ada pelanggaran dalam pelaporan keuangan. Komisaris independen serta komite audit dalam proses pengawasan di perusahaan tentu akan lebih diandalkan oleh para *stakeholder* mengingat status mereka sebagai pihak independen yang tidak terikat dengan perusahaan akan dapat lebih netral dalam melaksanakan tugasnya. Selain melaksanakan pengawasan, komisaris independen dan komite audit yang merupakan bagian dari upaya terwujudnya *good corporate governance* dalam perusahaan tentunya juga bertanggungjawab untuk mendorong perusahaan memenuhi keempat prinsip dasar dari *good corporate governance* itu sendiri, yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan dapat dipertanggungjawab dalam laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Selain pengawasan yang dilakukan oleh para dewan komisaris dan komite audit, auditor sebagai pihak yang menilai kelayakan laporan keuangan juga dapat menjadi pihak yang ikut membantu mendorong agar perusahaan dapat mengungkapkan informasi yang sesuai dengan kebenaran serta seluas-luasnya.

E. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini masih terdapat sejumlah keterbatasan, antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya meneliti 1 tahun periode sehingga tidak dapat melihat perbedaan hasil dari tahun ke tahun yang memiliki kemungkinan dapat munculnya hasil yang berbeda saat penelitian dilakukan dengan lebih dari 1 periode pelaporan keuangan tahunan. Selain itu adanya beberapa perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tahun 2016 sehingga sampel yang digunakan berkurang menjadi 52 perusahaan.
2. Pemilihan sampel yang hanya menggunakan perusahaan yang bergerak di sektor utama sehingga belum dapat menggambarkan hasil penelitian di sektor lainnya.
3. Hasil dari penelitian kurang bisa menggambarkan variabel yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi dengan pengaruh tiap variabel yang dapat dikatakan cukup kecil. Hal ini menunjukkan masih terdapat variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh lebih besar terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik pada Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,092 dengan nilai konstanta sebesar 0,316. Nilai t hitung sebesar 2,891 dengan signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari pada 0,05. Koefisien determinasi (*r square*) sebesar 0,143 menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh sebesar 14,3% dalam kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi dan sisanya sebesar 85,7% dipengaruhi oleh variabel lain.
2. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi berdasarkan PSAK 7. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,037 dengan nilai konstanta sebesar 0,512. Nilai t hitung sebesar

1,244 dengan signifikansi sebesar 0,219 lebih besar dari pada 0,05. Koefisien determinasi (*r square*) sebesar 0,030 menunjukkan bahwa komisaris independen hanya memiliki pengaruh sebesar 3% dalam kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi dan sisanya sebesar 97% dipengaruhi oleh variabel lain.

3. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi berdasarkan PSAK 7. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,103 dengan nilai konstanta sebesar 0,533. Nilai t hitung sebesar 1,967 dengan signifikansi sebesar 0,055 lebih kecil dari pada 0,10. Koefisien determinasi (*r square*) sebesar 0,072 menunjukkan bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh sebesar 7,2% dalam kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi dan sisanya sebesar 92,8% dipengaruhi oleh variabel lain.
4. Komite audit, komisaris independen, dan ukuran KAP secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi berdasarkan PSAK 7. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,077 untuk komite audit, 0,015 untuk komisaris independen, dan 0,062 untuk ukuran KAP dengan nilai konstanta sebesar 0,306. Nilai f hitung sebesar 3,397 dengan signifikansi sebesar 0,025 lebih kecil dari pada 0,05. Nilai dari *r square* sebesar 0,175 menunjukkan bahwa komite audit, komisaris independen, dan ukuran KAP secara bersama-sama memiliki pengaruh sebesar 17,5%

dalam tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi dan sisanya sebesar 82,5% dipengaruhi oleh variabel lain.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan

- a. Dengan hasil komite audit yang menunjukkan memiliki pengaruh positif signifikan, sebaiknya perusahaan mempertimbangkan kembali jumlah komite audit yang dimiliki, terutama untuk perusahaan yang memiliki jumlah komite audit di bawah ketentuan minimum yang telah ditetapkan yaitu minimal memiliki komite audit sejumlah 3 orang.
- b. Hasil penelitian menunjukkan masih kurangnya efektivitas komisaris independen, sehingga perusahaan diharapkan dapat menelaah kembali bagaimana sistem pemilihan komisaris independen pada perusahaan serta jumlah komisaris independen yang dimiliki supaya dapat memberikan pengaruh lebih kuat terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Dikarenakan variabel dalam penelitian ini besaran pengaruhnya masih terhitung kecil, akan lebih baik jika penelitian selanjutnya menambahkan variabel-variabel lain seperti komponen perusahaan yang termasuk dalam *good corporate governance* dan memiliki

tanggung jawab pada pelaporan keuangan perusahaan, misalnya auditor internal dan direksi.

- b. Penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih dari satu periode sehingga dapat mengetahui bagaimana keefektifan variabel bila terdapat perubahan pada variabel dependen maupun independen dari periode satu ke periode lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Angga Putri. 2012. Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan, Struktur Kepemilikan, *Leverage*, dan Auditor Terhadap Pengungkapan Sukarela. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Ahmad, Rudy. 2017. Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP Terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka *Integrated Reporting*. Jurnal Nominal, Vol. 6, No. 2 : 125-135.
- Apriani, Heni Werdi. 2015. Pengaruh *Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Transaksi Berelasi di Indonesia. Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol.4, No. 1:36-50.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astasari, Kristiana Gabriela Astri dan Yeterina Widi Nugrahanti. 2015. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci di Laporan Keuangan. Jurnal Manajemen Vol. 10, No. 2.
- Azwar, Saufuddin. 2005. Signifikan atau Sangat Signifikan?. Buletin Psikologi, Vol. 13, No.1:38-44.
- Bursa Efek Indonesia. 2018. Laporan Keuangan dan Tahunan. (<http://www.idx.co.id>). Diakses pada 25 Februari 2018.

- Chaghadari, M.F. & Shukor Z.A. 2011. *Corporate Governance and Disclosure of Related Party Transactions. 2nd International Conference on Business and Economic Research.*
- Chrisdianto, Bernadinus. 2013. Peran Komite Audit dalam *Good Corporate Governance*. Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 2 No. 1:1-8.
- Dyanty, Vera, dkk. 2012. Pengaruh Kepemilikan Pengendali Akhir Terhadap Transaksi Pihak Berelasi. Universitas Indonesia.
- Elhelaly, Moataz. 2014. *Corporate Governance and Related Party Transactions Research: An Assessment of Theories and Methodologies. Corporate Ownership of Control*, Vol. 11 No. 2:578-582.
- FCGI. 2001. Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan). Jilid II, Edisi 2.
- Ferdinal, Mochammad Ferry. 2012. Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Pengungkapan Sukarela Dengan Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. Skripsi. Universitas Indonesia. Diakses pada 21 November 2017.
- Halim, A. 2008. Auditing: Dasar-Dasar Audit Laporan keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hamid, Abdul. 2013. Pengaruh Tenur KAP dan Ukuran KAP Terhadap Kualitas Audit. Skripsi. Universitas Negeri Padang.

- Hasnan, Suhaily, Dkk. 2016. *Related Party Transactions and Earnings Quality: Does Corporate Governance Matter?. International Journal of Economics and Management*, Vol. 10, No. 2 : 189-219.
- Jensen, M.C. & Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol.3, No.4: 305-360.
- Juvita, Desriana dan Sylvia Veronica Siregar. 2013. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Hubungan Besaran dan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi dengan Manajemen Laba: Studi Empiris Perubahan PSAK No. 7. *Jurnal Akuntansi & Auditing* Vol. 10, No. 1:45-67.
- Maigoshi, dkk. 2016. *Earnings Management: A Case of Related Party Transactions. International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 6 (S7) 51-55.
- Mizdareta, Shella. 2015. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Latar Belakang Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Skripsi. Universitas Bengkulu.
- Munir, Sa'adiyah, dkk. 2013. *Family Ownership, Related-Party Transactions and Earnings Quality. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, Vol. 9, No. 1 : 129-153.
- Nugraha, Agung. 2017. Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Komisaris Independen dan Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Nugroho, Agus Sumarnadi. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Keluasan Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Sektor Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 1, No. 12.
- Raharjo, Eko. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnal Fokus Ekonomi*, Vol. 2, No. 1 : 37-46.
- Rossieta, Hilda dan Arie Wibowo. 2009. Faktor-Faktor Determinasi Kualitas Audit – Suatu Studi Dengan Pendekatan Earnings Surprise Benchmark, Simposium Nasional Akuntansi XII, Palembang.
- Rully Indrawan, R. Poppy Yaniawati. 2014. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Saham OK. 2017. Daftar Emiten Saham 2016. (<https://www.sahamok.com>). Diakses pada 25 Februari 2018.
- Saham OK. 2018. Sektor Utama BEI. (<https://www.sahamok.com>). Diakses pada 25 Februari 2018.
- Sari, Ratna Candra. 2012. Model Penilaian Transaksi Pihak Berelasi yang Terindikasi *Tunneling*: Bukti Empiris pada Transaksi Pihak Berelasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 17, No. 2:92-117.
- Sari, Ratna Candra dan Abdullah Taman. 2011. Pengembangan Model Prediksi *Tunneling*: Bukti Empiris pada Transaksi Pihak Berelasi Perusahaan Publik di Indonesia. Universitas Negeri Yogyakarta.

- Sari, Ratna Candra dan Sugiharto. 2014. *Tunneling dan Corporate Governance*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian untuk Bisnis Edisi Keempat*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sulthon, Muhajir. 2015. *Analisis Pengaruh Audit Tenure, Rotasi KAP, Ukuran KAP, dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Suaryana, Agung. *Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Laba*. Universitas Udayana.
- Suryandari, Ayu. 2014. *Tunneling Sebagai Insentif dari Manajemen Laba Melalui Transaksi Pihak Berelasi di Sekitar Penawaran Saham Perdana*. Skripsi. Universitas Kristen Satya Wacana. Diakses pada 20 November 2017.
- Utami, Riska dan Betri Sirajuddin. *Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), Masa Perikatan dan Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus KAP di Palembang)*. STIE MDP.
- Widarto. 2013. *Penelitian Ex Post Facto*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Yuliana, Emma, Dini Wahjoe Hapsari. *Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit*. Universitas Telkom.

LAMPIRAN

Lampiran 1. PSAK 7 mengenai pengungkapan

12. Dalam ...
dari entitas asosiasi tersebut dan suatu ventura bersama ...
bersama tersebut. Oleh karena itu, sebagai contoh, entitas anak dari entitas asosiasi dan
investor yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi tersebut merupakan pihak
berelasi satu dengan yang lainnya.

PENGUNGKAPAN

Seluruh Entitas

13. Hubungan antara entitas induk dan entitas anak diungkapkan terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka.

14. Untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak dari hubungan pihak berelasi pada suatu entitas, maka sangat tepat untuk mengungkapkan hubungan dengan pihak-pihak berelasi ketika pengendalian itu ada, terlepas apakah telah terjadi transaksi antara pihak-pihak berelasi.

15. Persyaratan untuk mengungkapkan hubungan pihak berelasi antara satu entitas induk dan entitas anaknya merupakan tambahan atas persyaratan pengungkapan dalam PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri dan PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain.

16. Dikosongkan.

17. Entitas mengungkapkan kompensasi personil manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing kategori berikut:

- (a) imbalan kerja jangka pendek;
- (b) imbalan pascakerja;
- (c) imbalan kerja jangka panjang lainnya;
- (d) pesangon; dan
- (e) pembayaran berbasis saham.

17A. Jika entitas memperoleh jasa personil manajemen kunci dari entitas lain ("entitas manajemen"), maka entitas tidak disyaratkan untuk menerapkan persyaratan dalam paragraf 17 atas imbalan yang dibayarkan atau terutang oleh entitas manajemen kepada pekerja atau direktur entitas manajemen.

18. Jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam

laporan keuangan. Persyaratan pengungkapan ini merupakan tambahan persyaratan di paragraf 17. Sekurang-kurangnya, pengungkapan meliputi:

- (a) jumlah transaksi;
- (b) jumlah saldo, termasuk komitmen, dan:
 - (i) syarat dan ketentuannya, termasuk apakah terdapat jaminan, dan sifat imbalan yang akan diberikan, dalam penyelesaian; dan
 - (ii) rincian jaminan yang diberikan atau diterima;
- (c) penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut; dan
- (d) beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak berelasi.

18A. Jumlah yang dibayarkan oleh entitas untuk penyediaan jasa personil manajemen kunci yang disediakan oleh entitas manajemen yang terpisah diungkapkan.

19. Pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 18 dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori berikut:

- (a) entitas induk;
- (b) entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap entitas;
- (c) entitas anak;
- (d) entitas asosiasi;
- (e) ventura bersama dimana entitas merupakan venturer bersama (joint venturer);
- (f) personil manajemen kunci dari entitas atau entitas induknya; dan
- (g) pihak-pihak berelasi lainnya.

20. Klasifikasi jumlah yang terutang dari, dan tagihan kepada, pihak-pihak berelasi dalam berbagai kategori seperti yang disyaratkan di paragraf 19 merupakan perluasan dari persyaratan pengungkapan dalam PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* untuk informasi yang akan disajikan baik dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Kategori tersebut diperluas untuk menyediakan analisis yang lebih komprehensif atas saldo dari pihak berelasi dan berlaku untuk transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

21. Berikut ini adalah contoh transaksi yang diungkapkan jika dilakukan dengan pihak berelasi:

- (a) pembelian atau penjualan barang (barang jadi atau setengah jadi);
- (b) pembelian atau penjualan properti dan aset lain;
- (c) penyediaan atau penerimaan jasa;
- (d) sewa;
- (e) pengalihan riset dan pengembangan;
- (f) pengalihan di bawah perjanjian lisensi;
- (g) pengalihan di bawah perjanjian pembiayaan (termasuk pinjaman dan kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai atau natura);
- (h) provisi atas jaminan atau agunan; dan
- (i) komitmen untuk melakukan sesuatu jika peristiwa khusus terjadi atau tidak terjadi di masa depan, termasuk kontrak eksekutori¹ (diakui atau tidak diakui); dan
- (j) penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau pihak berelasi.

22. Partisipasi oleh entitas induk atau entitas anak dalam program imbalan pasti yang membagi risiko antar entitas dalam kelompok usaha adalah suatu transaksi antara pihak berelasi (lihat PSAK 24: *Imbalan Kerja* paragraf 42).

23. Pengungkapan bahwa transaksi pihak-pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar dapat dilakukan hanya jika hal tersebut dapat dibuktikan.

24. *Pos yang memiliki sifat yang serupa dapat diungkapkan secara gabungan kecuali ketika pengungkapan terpisah diperlukan untuk memahami dampak transaksi pihak-pihak berelasi terhadap laporan keuangan entitas.*

Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah

25. *Entitas pelapor dikecualikan dari persyaratan pengungkapan di paragraf 18 atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi dan saldo, termasuk komitmen dengan:*

- (a) *pemerintah yang memiliki pengendalian, atau pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan, atas entitas pelapor; dan*
- (b) *entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena dikendalikan atau dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah yang sama atas entitas pelapor dan entitas lain tersebut.*

26. *Jika entitas pelapor menerapkan pengecualian di paragraf 25, maka entitas mengungkapkan mengenai transaksi dan saldo terkait yang dirujuk paragraf 25, yaitu:*

- (a) *nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor (yaitu, pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan);*
- (b) *informasi berikut dengan rincian yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap laporan keuangan:*
 - (i) *sifat dan jumlah setiap transaksi yang secara individual signifikan; dan*
 - (ii) *untuk transaksi lainnya yang secara kolektif, tetapi tidak secara individu, signifikan, indikasi secara kualitatif atau kuantitatif atas luasnya transaksi tersebut. Jenis transaksi tersebut termasuk yang dijelaskan di paragraf 21.*

27. Dalam menggunakan pertimbangan untuk menentukan seberapa rinci pengungkapan yang disyaratkan sesuai dengan paragraf 26(b), entitas pelapor mempertimbangkan kedekatan hubungan pihak-pihak berelasi dan faktor lain yang relevan dalam menentukan tingkat signifikansi suatu transaksi, seperti:

- (a) ukuran yang signifikan;
- (b) dilakukan di luar ketentuan pasar;
- (c) di luar operasi bisnis sehari-hari yang normal, seperti sebagai pembelian dan penjualan suatu bisnis usaha;
- (d) diungkapkan kepada regulator atau otoritas pengawas;
- (e) dilaporkan kepada manajemen senior;
- (f) bergantung pada persetujuan pemegang saham.

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

28. Entitas menerangkan Pernyataan

Lampiran 2. Data Sampel

No.	Perusahaan	Y	X1	X2	X3
1	AALI	0,714	3	2	1
2	ADRO	0,857	3	2	1
3	ARII	0,857	3	2	0
4	ARTI	0,429	2	1	0
5	ATPK	0,857	3	1	0
6	BIPI	0,857	2	1	0
7	BSP	0,857	3	3	0
8	BSSR	0,714	3	3	0
9	BTEK	0,571	3	1	0
10	BUMI	0,571	3	0	0
11	BWPT	0,429	3	2	1
12	BYAN	0,571	4	2	1
13	CITA	0,571	3	1	0
14	CPRO	0,429	3	2	1
15	CTTH	0,571	3	1	0
16	DEWA	0,571	3	2	0
17	DKFT	0,714	3	1	0
18	DOID	0,429	3	4	0
19	DSFI	0,286	0	1	0
20	DSNG	0,714	3	3	1
21	ENRG	0,571	3	2	0
22	ESSA	0,571	3	1	1
23	GOLL	0,571	4	1	0
24	GEMS	0,714	3	3	1
25	GTBO	0,286	3	1	0
26	GZCO	0,429	3	1	0
27	HRUM	0,714	3	2	1
28	IIKP	0,000	0	1	0
29	INCO	0,571	3	3	1
30	ITMG	0,857	4	2	1
31	JAWA	0,429	3	1	0
32	KKGI	0,714	3	2	0
33	LSIP	0,571	3	2	1
34	MBAP	0,571	3	1	1
35	MDKA	0,429	3	2	0

No.	Perusahaan	Y	X1	X2	X3
36	MEDC	0,857	3	2	1
37	MITI	0,429	2	2	0
38	MYOH	0,429	3	1	1
39	PALM	0,429	3	3	0
40	PKPK	0,000	3	1	0
41	PSAB	0,571	0	1	0
42	ANJT	0,571	3	3	1
43	PTRO	0,571	3	2	1
44	RUIS	0,571	3	1	0
45	SSMS	0,571	3	1	1
46	SGRO	0,714	3	1	1
47	SIMP	0,571	3	2	1
48	SMAR	0,571	3	4	0
49	SMMT	0,571	3	3	1
50	SMRU	0,429	3	1	0
51	TBLA	0,714	3	1	0
52	TOBA	0,857	3	1	1

Lampiran 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,17418791
Most Extreme Differences	Absolute	,093
	Positive	,093
	Negative	-,086
Test Statistic		,093
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,306	,099		3,080	,003		
	komite audit	,077	,034	,317	2,282	,027	,892	1,121
	komisaris independen	,015	,029	,071	,521	,605	,928	1,078
	ukuran KAP	,062	,053	,160	1,155	,254	,890	1,124

a. Dependent Variable: kepatuhan pengungkapan

Lampiran 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,207	,062		3,364	,002
	komite audit	-,019	,021	-,132	-,883	,382
	komisaris independen	-,007	,018	-,057	-,386	,701
	ukuran KAP	-,022	,033	-,101	-,672	,505

a. Dependent Variable: RES_2

Lampiran 6. Hasil Uji Hipotesis 1

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	komite audit ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: kepatuhan pengungkapan

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,378 ^a	,143	,126	,179292

a. Predictors: (Constant), komite audit

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,316	,094		3,366	,001
	komite audit	,092	,032	,378	2,891	,006

a. Dependent Variable: kepatuhan pengungkapan

Lampiran 7. Hasil Uji Hipotesis 2

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	komisaris independen ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: kepatuhan pengungkapan

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,173 ^a	,030	,011	,190769

a. Predictors: (Constant), komisaris independen

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,512	,058		8,771	,000
	komisaris independen	,037	,030	,173	1,244	,219

a. Dependent Variable: kepatuhan pengungkapan

Lampiran 8. Hasil Uji Hipotesis 3

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	ukuran KAP ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: kepatuhan pengungkapan

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,268 ^a	,072	,053	,186615

a. Predictors: (Constant), ukuran KAP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,533	,034		15,654	,000
	ukuran KAP	,103	,052	,268	1,967	,055

a. Dependent Variable: kepatuhan pengungkapan

Lampiran 9. Hasil Uji Hipotesis 4

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	ukuran KAP, komisaris independen, komite audit ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: kepatuhan pengungkapan

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,419 ^a	,175	,124	,179549

a. Predictors: (Constant), ukuran KAP, komisaris independen, komite audit

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,329	3	,110	3,397	,025 ^b
	Residual	1,547	48	,032		
	Total	1,876	51			

a. Dependent Variable: kepatuhan pengungkapan

b. Predictors: (Constant), ukuran KAP, komisaris independen, komite audit

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,306	,099		3,080	,003
	komite audit	,077	,034	,317	2,282	,027
	komisaris independen	,015	,029	,071	,521	,605
	ukuran KAP	,062	,053	,160	1,155	,254

a. Dependent Variable: kepatuhan pengungkapan